UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

Kuliah **Etika**

BEBAN PERADILAN HUKUM KONTEMPORER: PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN

hlm. 14-15

Kupas **Tuntas**
DUKUNG SIDANG
DAERAH, 66 STAF
BAWASLU PROVINSI
DIBIMTEK

hlm. 4-6

Perspektif
PROSES CEPAT UNTUK
MEMENUHI RASA
KEADILAN

hlm. 7

Ketok **Palu**
PASCA PEMILU
LEGISLATIF 2014, 102
PENYELENGGARA
PEMILU

hlm. 12

Perhelatan Akbar Berjalan Mulus

Bulan Juli adalah puncak perhelatan akbar pesta demokrasi. Setelah KPU menetapkan perolehan suara Pemilu Legislatif, agenda selanjutnya adalah suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilihan Presiden secara langsung.

KPU menetapkan dua pasangan calon presiden, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa diusung Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PBB, Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, PKPI, Partai Nasdem, Hanura.

Pemilu 2014 ini merupakan pengalaman pertama, pasca reformasi pemilihan presiden langsung, yang pesertanya hanya diikuti oleh dua pasangan. Konstelasi politik di parlemen pun hanya terbagi dalam dua kutub. Kondisi tersebut ditambah dengan realitas politik kedua pasangan mendapat dukungan yang sama-sama kuat.

Hal tersebut berdasarkan sejumlah *pooling* dari lembaga survey. Para elit politik baik itu tim sukarelawan maupun tim sukses saling bersaing untuk merebut hati masyarakat dari cara-cara positif bahkan ada pula yang melalui *black campaign*. Situasi politik semakin dinamis dan terasa menegangkan. Presiden SBY pun mengakui bahwa Pemilu kali ini merupakan pemilihan yang cukup menegangkan seperti yang diupload dalam akun pribadi SBY di *Youtube*, Jumat (25/7).

Kita mesti bersyukur. Pasalnya,

ketegangan politik hanya bumbu dalam berkompetisi. Pelaksanaan pungut hitung berlangsung aman dan damai. Tidak ada kerusuhan atau konflik. Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 semakin meneguhkan bahwa pelaksanaan pemilu khususnya pungut hitung di Indonesia berlangsung aman, tertib dan damai. Hal ini semakin menambah citra positif bangsa Indonesia di mata dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahkan Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Indonesia sudah pantas mendapatkan kategori negara demokrasi ketiga di dunia berdasarkan jumlah penduduk, setelah Amerika dan India.

Ada pun mengenai kekecewaan salah satu pasangan calon terhadap hasil adalah hal yang wajar dalam persaingan. Setiap kompetisi ada yang kalah ada pula yang menang. Kekecewaan bisa ditolerir apabila disalurkan melalui mekanisme yang konsitusional. Negara telah menyediakan wadah. Bila menyangkut hasil pemilu, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menyangkut ketidakpuasan kinerja atau kode etik penyelenggara pemilu, bisa disalurkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pasangan yang kalah pun telah menempuh jalur-jalur konsitusional. Kita patut menghargainya. Kita bersyukur telah melewati tahapan-tahapan pemilu, dan mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya. Semoga pemimpin terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat. ■

Daftar Isi

Warta DKPP

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) se-Indonesia Bertemu dalam Satu Forum

hlm. 3

Kupas Tuntas

Dukung Sidang Daerah, 66 Staf Bawaslu Provinsi Dibimtek

hlm. 4-6

Perspektif

Proses Cepat Untuk Memenuhi Rasa Keadilan

hlm. 7

Teropong

Semua Persoalan Dalam Pemilu Ada Mekanisme Penyelesaiannya

hlm. 8

Ragam

Beri Tausiyah, Ketua KPU Berharap Ketua Bawaslu Meneladani Nabi

hlm. 9

Mereka Bicara

Problematis Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

hlm. 10

Update

DKPP Keluarkan Surat Edaran untuk Penyelenggara Pemilu

hlm. 11

Ketok Palu

Sehari DKPP Berhentikan 17 Penyelenggara Pemilu

hlm. 12

Sisi Lain

Senjata Makan Tuan bagi Ketua dan Anggota KPU Sarmi

hlm. 13

Kuliah Etika

Memahami dan Menerapkan Sistem Etika Dalam Praktik Kehidupan Sosial

hlm. 14-15

Parade Foto

hlm. 16

DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit: DKPP RI **Pengarah:** Prof. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Saut H Sirait, M.Th., Prof. Anna Erliyana, SH, MH., Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, SH, MH., Ir. Nelson Simanjuntak **Penanggung Jawab:** Gunawan Suswantoro, SH, M.Si., **Redaktur:** Ahmad Khumaidi, SH, MH., **Editor:** Yusuf, S.Si, MA, Dini Yamashita S.Pi, MT, Dr. Osbin Samosir **Sekretariat:** Umi Nazifah, Diah Widayawati, Rahman Yasin, Susi Dian Rahayu, Sandhi Setiawan **Desain Grafis dan Fotografer:** Irmawanti, Teten Jamaludin, Arif Syarwani **Pembuat Artikel:** Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi: Jalan M. H. Thamrin No. 14 Lt. 5 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 391 4194

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) se-Indonesia Bertemu dalam Satu Forum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah di seluruh Indonesia. Acara tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 1-3 Juli 2014 di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan No.44-48, Tugu Tani, Jakarta.

Adapun agenda dari acara tersebut yaitu pada hari pertama, 1 Juli 2014, berupa pengarahan dari Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie. Pada hari kedua, 2 Juli, membahas mengenai daya dukung (*supporting system*) dalam kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP yang akan dipandu oleh Sekjen Bawaslu dan Sekjen KPU. Selanjutnya, acara inventarisasi problematika yang menjadi narasumbernya Prof Jimly Asshiddiqie.

Acara tersebut diikuti oleh 132 Tim Pemeriksa Daerah dari provinsi seluruh Indonesia, ertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah yang selama ini telah membantu DKPP dalam menangani perkara di daerah, selain itu DKPP juga ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Tim Pemeriksa Daerah saat

menangani perkara.

Acara dibuka langsung oleh ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Dalam sambutannya, Prof Jimly memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemeriksa daerah yang telah membantu tugas DKPP dalam menangani perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah.

“Jika ada Tim Pemeriksa Daerah yang belum pernah menangani perkara, berarti dia telah sukses karena Pemilu di daerah nya bersih dari pelanggaran-pelanggaran etik,” ujar Prof Jimly dalam sambutannya.

Selain itu, Prof Jimly juga menyerukan kepada seluruh Tim Pemeriksa Daerah dalam rangka menghadapi Pilpres yang tinggal menghitung hari agar senantiasa dapat menjaga netralitas, dan menjunjung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.

“Pekerjaan kita ini merupakan bagian dari agenda besar, yaitu untuk menjadikan pemilu kita berintegritas, yang merupakan core-business dari demokrasi. Dengan harapan kalau pemilu kita berintegritas, demokrasi kita pun berintegritas,” tambahnya.

Selain itu, acara diisi dengan diskusi dan *sharing* antar Tim Pemeriksa

Daerah, mereka mengungkapkan apa yang menjadi kendala pemeriksaan di daerah mereka masing-masing, dan membahas *problem solving*-nya. Selain itu, momen ini merupakan momen untuk mengakrabkan sesama TPD dari berbagai daerah. Diharapkan dari rapat ini, para majelis daerah ini mampu menginventarisasi problematika dan menemukan solusi konkrit untuk penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing.

Untuk diketahui, pasca Pileg 2014 hingga saat ini Tim Pemeriksa Daerah telah menangani dan memeriksa berbagai perkara di daerah masing-masing. “Keberadaan Tim Pemeriksa Daerah ini sangat membantu kami dalam menangani perkara yang membanjir pasca Pemilu legislatif, bayangkan saja pasca Pemilu legislatif hingga 25 Juni 2014 DKPP telah menerima 633 pengaduan,” kata Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini. Dari 633 pengaduan tersebut, sebanyak 178 perkara dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. DKPP berharap dapat menyelesaikan perkara tersebut sebelum Pilpres mendatang, hal ini tentu tidak lepas dari peran Tim Pemeriksa Daerah. ■

Susi Dian Rahayu

Dukung Sidang Daerah, 66 Staf Bawaslu Provinsi Dibimtek

Sejak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di 33 provinsi, sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak lagi harus digelar di Kantor DKPP di Jakarta. Sidang dapat digelar langsung di Kantor Bawaslu provinsi atau tempat lain yang memadai sesuai asal perkara. Sidang juga dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *video conference* (vidcon) di mana para pihak, seperti Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, tinggal memilih apakah hadir di kantor DKPP atau di kantor Bawaslu Provinsi.

Tinggal persoalannya adalah bagaimana agar sidang-sidang tersebut dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Tentu, sidang di kantor DKPP lebih siap secara sarana dan prasarana, karena memang telah lama dilakukan. Sementara sidang di daerah menjadi hal baru yang sudah pasti akan banyak keterbatasan. Keterbatasan tersebut tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana sidang. Ada juga soal sumber daya manusia (SDM) yang memfasilitasi jalannya persidangan.

Terkait SDM, DKPP memutuskan untuk melibatkan staf Bawaslu Provinsi membantu segala persiapan dan kebutuhan selama menjalankan sidang di daerah maupun sidang vidcon. Secara ketentuan, hal ini tidak ada persoalan. Seperti dikatakan oleh Anggota DKPP sekaligus Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, beberapa waktu lalu, antara DKPP dan Bawaslu itu satu sekretariat. Sehingga, staf DKPP juga bagian dari sekretariat Bawaslu.

"Tidak ada masalah jika staf Bawaslu Provinsi diperbantukan dalam kegiatan DKPP, semisal sidang-sidang daerah. Toh, mereka juga satu sekretariat di bawah Bawaslu," ujar Nelson.

Untuk memperkuat tugas perbantuan oleh staf Bawaslu Provinsi, secara resmi Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 668-KEP Tahun 2014 perihal penunjukan dua staf sekretariat Bawaslu Provinsi dalam membantu tugas-tugas DKPP. SK ini merupakan perubahan atas keputusan Sekjen Bawaslu No 403-KEP Tahun 2014 tentang penunjukan staf sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai penerima pengaduan/laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah.

DKPP kemudian menindaklanjuti SK Sekjen Bawaslu tersebut dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek)

kepada staf-staf Bawaslu Provinsi yang telah ditunjuk. Bimtek diadakan selama tiga hari, dari 17 sampai 19 Juli 2014. Digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Acara secara resmi dibuka oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi empat Anggota DKPP, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Anna Erliana.

Dalam sambutannya, Jimly menekankan pentingnya efisiensi kerja. Menurutnya, 66 staf Bawaslu Provinsi yang akan dibimtek selama tiga hari ini tugasnya adalah menjadi pendukung bagi sidang-sidang DKPP di daerah.

"Anda adalah staf yang dipilih oleh

Bawaslu dari 33 provinsi. Tugas Anda mendukung para Tim Pemeriksa Daerah,” jelas Jimly, Kamis (17/7/2014)..

Bagi Jimly, dua orang staf Bawaslu Provinsi sudah cukup untuk mengurus sidang di daerah. Syaratnya, mereka harus memiliki kemauan kerja yang baik. Kalau semua orang dapat bekerja dengan efektif tidak perlu dikerjakan orang banyak. Jimly membandingkan dengan kualitas kerja di Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia dengan Amerika tidak ada perbedaan jumlah waktu. Sehari, di AS juga 24 jam. Namun, yang membedakan adalah kualitasnya (*quality time*).

“Kita ini butuh staf-staf yang punya inisiatif, trengginas, dan efektif. Para staf yang akan memfasilitasi TPD juga harus tahu apa yang akan dikerjakan. Anda harus pahami apa itu tugas Bawaslu, apa tugas DKPP. Oleh karena itu, dalam tiga hari ini akan diberikan pengetahuan tentang kerja DKPP dan teknis-teknisnya,” ujarnya.

Hampir senada dengan Prof Jimly, pada kesempatan tersebut Anggota DKPP yang juga Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menekankan pentingnya pengetahuan tentang tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) kelembagaan. Dia meminta kepada para peserta bimtek mencintai pekerjaannya dan terus belajar.

“Saya dulu juga pernah menjadi staf sekretariat Bawaslu. Stafnya Pak Nur Hidayat Sardini. Kalau Anda sungguh-sungguh bekerja, saya yakin akan bisa menjadi anggota Bawaslu,” kata Nelson memotivasi.

■■■■

Keesokan hari, Jumat (18/7/2014), bimtek masuk pada sesi materi. Setidaknya ada empat materi yang disampaikan, yakni terkait tujuan bimtek, materi pengaduan, materi persidangan, dan materi terkait inventarisasi problematika sidang vidcon. Untuk materi-materi tersebut diisi langsung oleh narasumber dari DKPP, antara lain Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait. Selain itu, narasumber lain adalah tiga Tenaga Ahli yang dimiliki oleh DKPP, yakni Ihat Subihat, Firdaus, dan Syopiansyah Jaya Putra.

Pada sesi tentang tujuan bimtek, 66 peserta disatukan dalam kelas besar. Narasumbernya Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan Sirait. Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS

menjelaskan tentang apa yang dimaksud kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagai Anggota DKPP yang sering memeriksa atau menyidangkan berbagai perkara, dia banyak bercerita tentang pengalamannya menjadi majelis DKPP.

Ada kesan publik bahwa DKPP itu kerjanya memberhentikan penyelenggara Pemilu, baik dari jajaran KPU ataupun dari jajaran Bawaslu. Namun, menurut NHS, kesan itu tidak sepenuhnya benar. DKPP tidak asal-asalan dalam memberhentikan penyelenggara Pemilu. Tapi kalau memang sudah nyata-nyata melanggar kode etik, kata dia, DKPP tidak segan-segan memberhENTIKANNYA.

“Memberhentikan orang itu jangan kira enak. Seakan itu menjadi hobi kami. Itu mematikan perdata yang bersangkutan. Akan tetapi ada yang mengharuskan. Kami disumpah untuk itu,” kata Nur Hidayat Sardini.

Keberadaan DKPP sebagai lembaga semiperadilan memang mengharuskan untuk memutus suatu perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Namun, tambah dia, dalam memutus perkara, seorang majelis tidak boleh karena emosional.

“Memberi sanksi itu sebagai ekspresi kecintaan kami kepada penyelenggara Pemilu, kecintaan kepada bangsa. Ada yang bilang, hakim itu satu digit di bawah dewa. Makanya, dalam memutus, dia harus ikhlas, *wise*,” ujar dia.

■■■■

Hal yang tidak kalah penting yang menjadi tujuan bimtek adalah mendengar langsung pengalaman beberapa peserta yang kebetulan TPD-nya sudah pernah menjalani sidang di daerah ataupun yang pernah melakukan sidang vidcon. Untuk sesi ini, maka bimtek juga mengetengahkan materi terkait persidangan dan materi problematika sidang daerah dan sidang vidcon. Sesi ini dipandu oleh Kepala Sekretariat Persidangan DKPP Osbin Samosir serta Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi DKPP Syopiansyah Jaya Putra.

Menurut Osbin, ada tiga hal yang harus diperhatikan staf dalam memfasilitasi sidang. Pertama adalah tahap pra-sidang. Pada tahap ini staf harus menyiapkan segala kebutuhan persidangan. Misalnya perangkat sidang seperti palu sidang, papan nama para pihak, pengeras suara, tata ruangan, Alquran atau Alkitab untuk pembacaan

sumpah, lafal sumpah, dan lain-lain.

Kedua adalah tahap persidangan. Untuk tahap ini, yang perlu disiapkan adalah petugas MC, pembaca tata tertib, dirigen lagu kebangsaan, notulensi, dan sebagainya. Tidak kalah penting, kata Osbin, petugas persidangan harus selalu siap mengantisipasi jika terjadi hal-hal teknis yang mengganggu jalannya persidangan, seperti mati lampu atau lainnya.

"Hal-hal kecil harus diperhatikan, semisal pembacaan tatib, dirigen lagu Indonesia Raya, serta antisipasi kalau mati listrik," ingat dia.

Ketiga adalah tahap pasca-sidang. Tugas staf dalam tahap ini adalah menyerahkan hasil notulensinya kepada majelis untuk dibahas dalam rapat pleno. Osbin mewanti-wanti agar petugas sidang, terutama tim notulensi harus fokus mencatat semua yang terungkap dalam sidang.

"Semuanya ketik saja. Jangan sampai ada satu pun substansi persidangan yang kelewat," terang Osbin.

Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan teknologi dalam persidangan, terutama ketika menggelar sidang jarak jauh melalui vidcon, banyak pengalaman atau kendala-kendala yang disampaikan oleh peserta. Pemateri sesi ini, Syopiansyah Jaya Putra tidak menampik bahwa memang tidak sela-

manya sidang melalui vidcon berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang sering dijumpai. Kendala-kendala ini diakuinya kerap mengganggu jalannya persidangan.

Sidang melalui vidcon ini salah satunya sangat tergantung dengan koneksi jaringan internet. Dalam beberapa pengalaman, Syopian mencontohkan ketika koneksi internet bagus namun kualitas suara kurang bagus. Sehingga majelis pusat dan Tim Pemeriksa Daerah tidak bisa berkomunikasi. Dalam kondisi seperti itu, yang paling sederhana, kata Syopian, perlu disiapkan telepon genggam.

"Telepon genggam ini harus memiliki perangkat *speaker phone*. Bila perlu sebelum sidang dimulai, telepon genggam itu sudah terhubung. Sehingga ketika, komunikasi pusat dan daerah melalui internet tidak tersambung, *speaker phone* ini sebagai penunjang," katanya.

Begitu juga, lanjut dia, saat mati listrik. Kejadian mati listrik sering dialami. Pada kondisi tersebut, komunikasi majelis di pusat dengan tim pemeriksa daerah otomatis terputus. Untuk itu *speaker phone* ini sangat bermanfaat dalam sidang. Sebaiknya, setiap kesekretariatan perlu secara khusus memiliki *Handphone* yang memiliki *speaker phone*.

Mantan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Ja-

karta itu menjelaskan, ketika perangkat video conference tidak bisa digunakan, ada perangkat lain yang cukup mampu mem-back up persidangan, yaitu Skype. Guna kelancaran persidangan, dia juga mengingatkan, saat sidang *video conference* tidak diperkenankan membuka laman (situs) yang membutuhkan koneksi internet tinggi seperti men-download atau membuka Youtube di lingkungan kesekretariatan.

"Bila perlu, saat sidang di-block saja koneksi internetnya, dikhususkan untuk *video conference*," pesan dia.

Soal dukungan IT, khususnya terkait koneksi internet diakui menjadi titik lemah penyelenggaraan sidang vidcon. Tak pelak, ketika Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro hadir di tengah-tengah forum, momen itu dimanfaatkan oleh peserta bimtek untuk menyampaikan persoalan tersebut. Kehadiran Sekjen di acara bimtek sebenarnya dijadwalkan untuk mendengar laporan pelaksanaan bimtek sekaligus menutup acara. Mendengar keluhan peserta, Sekjen mengaku sudah memikirkan hal itu. Menurutnya, Bawaslu sudah menyiapkan penambahan *bandwidht* demi lancarnya kegiatan *video conference*. Ini tidak hanya akan berguna bagi sidang vidcon DKPP, tapi juga bagi kegiatan-kegiatan Bawaslu. ■

Arif Syarwani

Proses Cepat Untuk Memenuhi Rasa Keadilan

Prinsip universal yang berlaku dalam proses peradilan adalah cepat, tepat, dan biaya ringan. Hal tersebut juga diupayakan berlangsung dalam proses pengadilan etika penyelenggara pemilihan umum yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sekalipun diupayakan berlangsung cepat; DKPP memastikan bahwa proses yang berjalan tetap harus mengikuti ketentuan. Misalnya saja, seluruh proses sejak pengaduan dan/atau laporan diterima hingga penelitian atau verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi materiil dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Untuk mendukung terwujudnya pengadilan etika yang modern DKPP

telah menetapkan peraturan mengenai tatalaksana organisasi. Di situ diatur antara lain alur pelaporan, ketentuan persyaratan administrasi dan materiil. Bagaimana masyarakat melapor, bagaimana tindak lanjut laporan yang masuk, cara persidangan juga sudah ada dalam peraturan DKPP. Kami juga mengupayakan persidangan cepat; kalau bisa satu kali, atau dua kali, atau bisa sampai empat kali kalau memang kasusnya besar.

Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, termuat proses penanganan pengaduan dan/atau laporan. Secara singkat, proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Waktu yang dibutuhkan mulai peng-

aduan hingga putusan diusahakan secepat mungkin. Persidangan cepat, putusan cepat. Ini agar gangguan di daerah (akibat kasus dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu) tidak berjalan terlalu lama.

Meskipun proses mulai persidangan hingga putusan cepat, putusan DKPP tetap berpegang pada kode etik. Masyarakat dapat menilai apa yang sudah diputuskan oleh DKPP. Ketua dan anggota DKPP memiliki ilmu kePemiluan, umumnya punya latarbelakang sebagai penyelenggara Pemilu sehingga punya pengalaman dan imajinasi. Itu semua memperkuat DKPP agar bekerja lebih baik sesuai yang ditugaskan oleh Undang-Undang. Sebagai lembaga yang baru, DKPP mulai bekerja sekaligus membangun DKPP. ■

Diah Widayawati

Semua Persoalan Dalam Pemilu Ada Mekanisme Penyelesaiannya

Pada Selasa (22/7/2014), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014.

Belum selesai KPU menetapkan siapa pemenang Pilpres 2014, salah satu tim calon presiden dan wakil presiden, yakni tim Prabowo-Hatta melakukan aksi *walk out* dari ruang rapat. Pada intinya mereka menarik diri dari seluruh proses tahapan Pilpres.

Selanjutnya, langkah itu diikuti dengan pernyataan resmi capres Prabowo Subianto yang tidak memercayai semua proses penyelenggaraan Pilpres. Langkah tersebut tak ayal membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie.

“Sebagai ketua DKPP, saya prihatin terhadap pernyataan yang disampaikan oleh capres nomor urut 1 yang tidak akan mengikuti proses penetapan hasil Pemilihan Presiden. Ini terjadi di ujung proses. Ini tinggal ketok palu saja KPU,” ujar Jimly ketika menggelar konferensi pers di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Semua persoalan dalam Pemilu ada mekanisme penyelesaiannya.

Jika tidak menyetujui hasil penetapan KPU, masih tersedia jalan konstitusional terakhir, yakni di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pengamatan Jimly, proses Pilpres 2014 memang tidak lepas dari berbagai permasalahan. Namun, dia mengingatkan, semua permasalahan itu sudah diselesaikan secara berjenjang, mulai dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Keseluruhan proses juga telah dilaku-

kan secara terbuka dan disaksikan oleh semua pihak.

“Rapat pleno rekapitulasi di KPU RI sekarang, menurut saya sudah sangat terbuka. Kalau ada temuan silakan diselesaikan. Dan kalau beberapa masalah sudah diselesaikan di tiap tingkatan, maka asumsinya ketika sampai Jakarta seharusnya sudah matang,” tegasnya.

Bagi Jimly, semua persoalan dalam Pemilu ada mekanisme penyelesaian. Jika tidak menyetujui hasil penetapan KPU, masih tersedia jalan konstitusional terakhir, yakni di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelesaian lewat jalan demonstrasi, tambah dia, bukan jalan yang baik. Lebih baik melalui proses persidangan.

“Masih tersedia waktu. Lebih baik memanfaatkan waktu 30 hari yang disediakan untuk berproses di MK. Ini jauh lebih beradab. Proses hukum jangan hanya dilihat menang kalah, tapi lihat juga prosesnya. Proses 30 hari di MK itu sama mulianya dengan menang atau kalah. Saya percaya, MK saat ini independen. Pascakasus Akil, mereka sedang mencari kesempatan untuk membuktikan diri dapat bekerja dengan netral,” ungkap Jimly optimistis. ■

Arif Syarwani

Beri Tausiyah, Ketua KPU Berharap Ketua Bawaslu Meneladani Nabi

A cara buka puasa bersama di rumah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, di kompleks Perumahan Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014) terasa beda. Hampir tidak ada pembicaraan politik. Padahal saat itu baru saja ada gelaran politik berupa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para *stakeholder* Pemilu seperti Ketua dan Anggota Bawaslu serta Ketua dan Anggota KPU.

Tuan rumah, Prof Jimly dari awal memang sudah mewanti-wanti agar dalam acara yang dipenuhi awak media massa tersebut tidak ada pembicaraan politik ataupun hal-hal terkait penyelenggaraan Pilpres.

"Sekarang kita acara rohani dulu. Jangan pikirkan Pemilu melulu, pusing kita. Nanti kita minta Pak Muhammad dan Pak Husni berikan tausiyah rohani. Karena dua-duanya juga ustaz," kata Jimly saat memberikan kata sambutan.

Permintaan tuan rumah ternyata disambut baik oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dengan piawai, dia mengisi tausiyah selayaknya para ustaz. Meskipun isi tausiyahnya ternyata tidak lepas dari konteks kepolitan, namun semua dikemas dengan apik oleh mantan komisioner KPU Sumatera Barat ini.

Husni menyinggung soal realitas Pilpres 2014 di mana ada dua kubu yang sedang berkompetisi. Akibat kompetisi tersebut masyarakat telah terbelah menjadi dua. Atas realitas seperti itu,

menurut Husni, harus ada kelompok atau orang yang dapat menyatukan kembali (memediasi) perpecahan. Dia sangat berharap hal tersebut dapat dilakukan oleh Ketua Bawaslu Muhammad.

Kemudian dia mencontohkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh seorang Nabi yang kebetulan namanya sama dengan ketua Bawaslu, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah, Nabi Muhammad pernah berhasil menengahi perselisihan antara suku Quraisy dan suku Hawazin di Mekah. Ketika itu baru saja terjadi banjir besar yang merusak Ka'bah. Perselisihan terjadi saat menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula.

"Kedua belah pihak sama-sama ngotot dan merasa paling berhak mengangkat Hajar Aswad. Sampai kemu-

dian datanglah Muhammad yang saat itu baru berusia 35 tahun dan belum dikenal sebagai nabi. Karena ketulusannya, kedua kelompok sepakat untuk meminta pendapat Muhammad," tutur Husni.

Dengan bijaksana, Muhammad kemudian membentangkan serbannya. Muhammad meminta para pimpinan suku untuk memegang empat sisi ujung serban. Hajar Aswad diletakkan di atas serban dan diangkat bersama-sama untuk ditempatkan dalam posisi semula.

"Dengan kebijaksanaan tersebut tidak ada lagi perselisihan. Semua merasa puas. Itulah momentum di mana Muhammad kemudian diberi gelar al-Amin (yang tepercaya). Saya berharap, semoga Ketua Bawaslu pun dapat menengahi perseteruan dua calon dalam Pilpres ini," ujar Husni. ■

Arif Syarwani

Bung Palu

Pemilu 2014 ini merupakan pengalaman pertama, pasca reformasi pemilihan presiden langsung, yang pesertanya hanya diikuti oleh dua pasangan:

- Para elite politik baik itu tim sukarelawan maupun tim sukses saling bersaing untuk merebut hati masyarakat dari cara-cara positif bahkan ada pula yang melalui *black campaign*.
- Kita mesti bersyukur. Ketegangan politik hanya bumbu dalam berkompetisi. Pelaksanaan pungut hitung berlangsung aman dan damai. Tidak ada kerusuhan atau konflik.
- Semoga pemimpin terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat.

Problematis Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

[Suatu Tinjauan tentang Ketidakhadiran Saksi dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum di Daerah]

Oleh Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

B. Perspektif Ketidakhadiran Saksi dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Sebagaimana yang diuraikan pada tulisan terdahulu bahwa seseorang yang telah dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangannya atas peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, ternyata dirinya secara sengaja tidak mau melaksanakan kewajiban ini, maka kepadanya dapat dijatuhi sanksi pidana. Terkait dengan masalah ini, timbul pertanyaan: "apakah saksi yang telah dipanggil secara patut dan tidak mau hadir dalam persidangan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, dapat dijatuhi sanksi?"

Jawaban atas pertanyaan ini tentunya harus terlebih dahulu dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2011, tetapi dalam Undang-undang ini hanya ada satu pasal yang terkait dengan kewenangan pemanggilan saksi, yaitu Pasal 111 ayat (4) b, yang menentukan bahwa DKPP mempunyai kewenangan untuk memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, tetapi ancaman hukuman (sanksi) yang dapat diberikan kepada saksi yang tidak dapat atau tidak mau hadir dalam persidangan, ternyata tidak ada pengaturan lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan saksi dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013), ada ditentukan bahwa:

Ayat (1) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2

(dua) alat bukti.

Ayat (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat atau tulisan;
petunjuk;
keterangan para pihak; atau data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013, ditentukan pula bahwa acara pemeriksaan meliputi: (a) memeriksa kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor; (b) mendengarkan pokok pengaduan dan/atau laporan yang diajukan oleh pengadu dan/atau pelapor; (c) mendengarkan keterangan dan/atau jawaban teradu dan/atau terlapor; (d) mendengarkan keterangan saksi; (e) mendengarkan pendapat ahli; (f) mendengarkan keterangan pihak terkait; dan (g) memeriksa dan menge-

sahkan alat bukti dan barang bukti.

Selain ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013), ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, Tim Pemeriksa berwenang: (a) memanggil para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait; (b) mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam acara pemeriksaan; (c) meminta keterangan para pihak, saksi dan pihak terkait dan/atau pendapat ahli; (d) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam acara pemeriksaan; dan meminta alat bukti dan barang bukti lainnya.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2011, Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 dan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013, ternyata tidak ada satu pun pengaturan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada saksi yang tidak dapat atau secara sengaja tidak mau hadir dipanggil dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, padahal DKPP dan/atau TPD mempunyai kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan saksi dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Ketiadaan aturan yang demikian ini tentunya akan menimbulkan permasalahan, apabila keterangan saksi tersebut memang sangat diperlukan guna membuktikan kebenaran materil atas adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan saksi tidak akan dapat dijalankan secara efektif, jika tidak diikuti upaya paksa berupa sanksi bagi saksi yang tidak mau menghadiri pemanggilan dimaksud.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah terkait penerapan ketentuan tentang saksi yang terdapat dalam KUHP dan KUHP, “apakah saksi yang tidak dapat atau tidak mau hadir dipanggil dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan KUHP dan KUHP?” Penulis berpendapat, walaupun dalam Pasal 224 KUHP, Pasal 522 KUHP dan Pasal 159 ayat (2) KUHP, ada ditentukan bahwa saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi dapat dijatuhi pidana, tetapi terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, saksi dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan KUHP dan KUHP. Alasannya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP tersebut hanya berlaku bagi pelanggaran hukum, dan tidak berlaku bagi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum, karena antara hukum dan etika merupakan 2 (dua) hal yang berbeda.

Tidak dapatnya saksi yang tidak hadir dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dijatuhi sanksi pidana, dipertegas melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dalam Pasal 252 ayat (2), ditegaskan bahwa tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Memperhatikan kalimat terakhir pada Pasal 252 ayat (2) ini, yaitu “...ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilu”, berarti hal-hal yang terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, termasuk permasalahan saksi yang tidak dapat atau tidak mau hadir dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, tidak boleh mengacu kepada ketentuan hukum selain yang telah diatur dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Dengan demikian, saksi yang tidak dapat atau tidak mau hadir dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, tidak boleh dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan KUHP. ■

(bersambung)

DKPP Keluarkan Surat Edaran untuk Penyelenggara Pemilu

Dua hari jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2014, pada Senin (7/7/14) lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan jajarannya, serta Bawaslu dan jajarannya.

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa surat edaran yang dikeluarkan DKPP ini merupakan himbauan bagi para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya untuk senantiasa menaati kode etik penyelenggara Pemilu. Menurutnya, surat edaran tersebut untuk dijadikan sebagai pengingat agar seluruh penyelenggara Pemilu senantiasa menaati kode etik.

Banyaknya penyelenggara Pemilu yang dijatuhi sanksi baik berupa pemberhentian tetap maupun peringatan oleh DKPP, DKPP berpendapat bahwa pelanggaran etika penyelenggara pemilu telah merusak atau paling tidak mengurangi kepercayaan peserta dan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, baik jajaran KPU maupun Bawaslu. Sebagaimana diketahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, selain menciderai integritas pemilu, juga telah menghilangkan hak suara rakyat dan hak konstitusional peserta Pemilu.

Lebih lanjut, dalam surat edaran bernomor 016/DKPP/VII/2014 tersebut, DKPP berpendapat bahwa kondisi dan situasi Pilpres sangat berbeda dibanding Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Setiap jenis dan bentuk pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilpres akan

sangat potensil menimbulkan situasi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana diketahui satu suara sangat penting dan menentukan keterpilihan pasangan calon peserta Pilpres. Adapun himbauan yang disampaikan DKPP dalam surat edarannya meliputi, para penyelenggara Pemilu agar bersungguh-sungguh memelihara dan menegakkan etika penyelenggara Pemilu dengan bertindak jujur, netral, independen, transparan dan profesional dalam pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara. Tiap suara harus dijaga agar tidak dimanipulasi, digelembungkan atau dikurangi.

Berikutnya, sebagaimana diketahui penyelenggara Pemilu akan menjadi sasaran godaan, intervensi dan intimidasi dari pelbagai pihak untuk memenangkan salah satu peserta. Oleh sebab itu, diimbau agar melaporkan kepada pihak yang berwenang, baik atasan langsung maupun kepada pengawas dan DKPP. Selanjutnya, DKPP berkeyakinan bahwa keteguhan dan kekuatan moral penyelenggara Pemilu akan sangat menentukan integritas Pemilu dalam menghasilkan Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dipercayai, dan bermartabat. ■

Susi Dian Rahayu

Pasca Pemilu Legislatif 2014, 102 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

Sejak diselenggarakan-nya Pemilu Legislatif 2014 hingga 4 Juli 2014 sebanyak 102 penyelenggara Pemilu diberhentikan tetap oleh DKPP. Kebanyakan yang diberhentikan tersebut yakni dari unsur PPK berjumlah 46 orang, diikuti dengan KPU Kab/Kota sejumlah 39 orang. Sementara itu dari unsur Panwaskab/kota 8 orang, Panwascam 2 orang, dan PPS 7 orang. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada 157 Penyelenggara Pemilu, dan Pemberhentian Sementara kepada 5 Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, DKPP juga merehabilitasi nama baik 237 Penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DKPP tidak akan melindungi siapapun yang memang terbukti melanggar kode etik. "Pemberhentian ini untuk menyelamatkan nama baik lembaga, baik KPU maupun Bawaslu. Harapannya, Pilpres yang

sudah dekat ini jangan lagi dikotori oleh mereka-mereka yang bermasalah," kata Jimly.

Pasca Pemilu legislatif 2014 itu sendiri DKPP telah menerima aduan sebanyak 656 pengaduan. Dari total jumlah pengaduan tersebut, setelah dilakukan verifikasi materil dan formil (gelar perkara) sebanyak 258 pengaduan dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan, dan 398 Pengaduan dinyatakan tidak memenuhi unsur / syarat (*dismiss*). Mayoritas pelanggaran yang masuk ke DKPP terkait dengan pengelembungan suara/ manipulasi suara, adanya *conflict of interest* diantara para Penyelenggara Pemilu, adanya intervensi dari kepala daerah setempat, dan lain-lain.

Sementara itu, Anggota sekaligus juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa ada empat penyebab atau faktor, DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu. Sanksi yang diberikan DKPP tersebut sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dia menjelaskan, pertama sebagian besar pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilu berlatar belakang pengelolaan tahapan-tahapan Pemilu.

Hal ini ditambah dengan kapasitas atau penguasaan terhadap peraturan-peraturan Pemilu secara lebih tidak komprehensif dan tidak dipahaminya persoalan-persoalan lain di luar urusan Pemilu. Kedua, adanya ketidakmampuan menerjemahkan antara teks dan konteks. Yaitu, bila teks di dalam norma langsung diterjemahkan jelas tidak bermasalah, tidak memahami persoalan-persoalan birokrasi secara utuh aturan main lain yang berlaku dan terstandar. "Yang paling pokok dari masalah kedua adalah terlalu percaya diri secara tidak tepat," jelas pria yang kerap disapa NHS itu.

Ketiga, penyelenggara Pemilu tidak berpikir dan bertindak sistemik seperti, pemahaman makna koordinasi, konsultasi dan supervisi. Ada pula penyelenggara pemilu yang enggan atau bahkan menolak keputusan/kebijakan atau Putusan lembaga-lembaga lain karena tidak memanfaatkan. Keempat, penyelenggara Pemilu menampilkan citra diri dengan motif-motif yang mencederai kemandirian, integritas dan kredibilitas. Contoh-contoh perilaku itu, tak berpikir panjang atau terlalu jumawa, followers atau mengikuti arah angin. "Ada pula yang ingin memanfaatkan jabatan atau kewenangan," beber dosen Fisip Undip itu. ■

Susi Dian Rahayu

Senjata Makan Tuan bagi Ketua dan Anggota KPU Sarmi

Niat hati ingin memecat tiga anak buah, malah dia sendiri dan temannya yang diberhentikan. Begitulah nasib yang menimpa Yoshep Twenty, ketua, dan Odhy Yesaya Demetouw, anggota KPU Sarmi, Papua. Keduanya mengadukan tiga rekannya, Ferdinand F Yawan, Marhun Lapoando, dan Bitsael Marauw, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bukannya pemecatan yang diharapkan malah si Pengadu dan rekannya yang diberhentikan tetap. Diibaratkan senjata makan tuan.

Persoalan itu bermula dari tuduhan bahwa tiga Teradu telah dengan sengaja mengeluarkan formulir C1 berhologram dan membubuhkan tipe-x serta mengganti angka-angka tanpa dihadiri oleh Pengadu yang juga selaku ketua serta Odhy Yesaya Demetouw sebagai divisi teknis penyelenggaraan. Teradu pun tidak melibatkan Panwaslu serta saksi-saksi partai politik atas perubahan tersebut. Pengadu juga mendalilkan Tiga Teradu telah melakukan pembukaan dokumen rahasia serta telah melakukan rekapitulasi terhadap dokumen pleno tingkat Distrik Atos tanpa kehadiran dua Pengadu. Atas kondisi

itu, Pengadu membawa dokumen tersebut sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke KPU Provinsi, tujuannya guna mendapat penjelasan dan petunjuk mengenai keabsahan formulir C1 berhologram yang telah dibubuhi tipe-x itu.

Namun berdasarkan fakta di dalam persidangan, terbukti para Pengadu telah melakukan tindakan membawa lari dokumen rekapitulasi dari 6 (enam) PPD di Kabupaten Sarmi. Pengadu juga mengakui tidak melihat para Teradu melakukan pencoretan dan membubuhkan tipe-x atas dokumen rekapitulasi. Pengadu mengakui di kantor tidak ada tipe-x. Pengadu pun mengakui bahwa semua tuduhan terhadap para Teradu adalah berdasarkan anggapan semata, tidak melihat secara langsung dan juga tidak ada saksi. DKPP berkeyakinan bahwa para Pengadu telah melakukan tindakan pelanggaran ganda, yakni pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang merusak seluruh tatanan Pemilu dan demokrasi sehingga melanggar Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2011, dan No. 1 Tahun 2012 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan tindak pidana dalam bentuk membawa lari dokumen negara, yang seharusnya dilindungi, dijaga dan dipertahankan untuk tidak dibawa siapapun dari kantor KPU Kabupaten Sarmi.

"DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Pengadu I atas nama Yoshep Twenty dan Pengadu II atas nama Odhy Yesaya Demetouw dari jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi," kata Valina Singka Subekti, anggota majelis saat membacakan Putusan. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis lainnya Saut H Sirait, Valina Singka Subekti dan Anna Erliyana, Jumat (09/05).

Sedangkan kepada tiga Teradu, DKPP merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Ferdinand F Yawan, Teradu II atas nama Marhun Lapoando, dan Teradu III atas nama Bitsael Marauw selaku Anggota KPU Kabupaten Sarmi. "Para Teradu juga telah melakukan tindakan yang benar dengan mengadukan Para Pengadu yang membawa lari dokumen negara secara diam-diam, tanpa melalui rapat Pleno dan sama sekali tidak diketahui 3 (tiga) komisioner lain," jelasnya. ■

Teten Jamaludin

BEBAN PERADILAN HUKUM KONTEMPORER:

Pidana Penjara dan Kurungan

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok meliputi (i) pidana mati; (ii) pidana penjara; (iii) pidana kurungan; (iv) pidana denda; dan (v) pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan meliputi pidana (i) pencabutan hak-hak tertentu; (ii) perampasan barang-barang tertentu; dan (iii) pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana penjara dan pidana kurungan sama-sama merupakan bentuk pidana perampasan terhadap kemerdekaan pribadi, tetapi sifat hukumannya lebih ringan daripada pidana penjara, baik dari segi lamanya waktu, maupun dari segi perlakuan dan fasilitas yang diberikan kepada terpidana.

Pertama, pidana kurungan diancamkan terhadap jenis-jenis tindak kejahatan tertentu yang bersifat ringan atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran (bukan kejahatan). Sedangkan bentuk sanksi pidana penjara hanya diancamkan terhadap kejahatan, bukan yang termasuk kategori pelanggaran menurut KUHP. *Kedua*, lamanya pemidanaan pidana penjara maksimum adalah seumur hidup, yaitu sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana kurungan dijatuhkan paling lama hanya untuk waktu 1 tahun saja. *Ketiga*, pemenjaraan terpidana dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di mana saja di seluruh Indonesia, meskipun bukan di daerah dimana kejahatan dilakukan atau di daerah dimana pengadilan yang memeriksa dan memutus perkaranya. Sedangkan bagi terpidana kurungan hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan di daerah dimana terpidana berdomisili, sehingga kelu-

arga yang bersangkutan dapat dengan mudah berkunjung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, yang dimaksud dengan di daerah disini adalah di daerah kabupaten atau kota domisili yang bersangkutan.

Keempat, bagi narapidana kurun-

Mengenai pidana penjara seumur hidup, ada juga yang menafsirkannya bukan sebagai bentuk pemidanaan sampai yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi sampai selama usia terpidana ketika dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

gan diberikan hak dan kesempatan untuk membawa fasilitas kebutuhan sehari-hari ke untuk dipakai selama dalam kurungan, sedangkan narapidana penjara hanya boleh menikmati fasilitas yang tersedia dan disediakan

oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam hukum pidana, fasilitas inilah yang dinamakan sebagai '*hak pistole*', yang merupakan hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP. *Kelima*, bagi narapidana penjara dikenakan kewajiban yang berlaku untuk semua narapidana yang lebih berat daripada narapidana kurungan. *Keenam*, di samping itu, jika narapidana berada di satu lembaga pemasyarakatan, penempatan narapidana kurungan juga tidak dicampur dengan narapidana penjara lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHP yang mengharuskan narapidana kurungan diberi tempat yang terpisah dari narapidana penjara. Maksudnya tidak lain adalah untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada narapidana kurungan daripada kepada narapidana penjara.

Mengenai pidana penjara seumur hidup, ada juga yang menafsirkannya bukan sebagai bentuk pemidanaan sampai yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi sampai selama usia terpidana ketika dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. Misalnya, jika usia terpidana 30 tahun, maka hukuman dijatuhkan hanya untuk 30 tahun, sehingga pada usia yang bersangkutan genap 60 tahun, masa hukumannya berakhir. Namun demikian, jika kita bertitik tolak dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pendapat tersebut di atas dapat dikatakan tidak tepat. Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Keduanya merupakan kategori yang terpisah satu sama lain. Pidana seumur hidup bukanlah pidana selama waktu tertentu, dan demikian pula sebaliknya. Artinya, pidana penjara selama waktu tertentu seperti yang dicontohkan di atas, yaitu selama usia

ketika terpidana dijatuhi hukuman, bukanlah termasuk ke dalam kategori pidana penjara seumur hidup.

Lagi pula dalam pasal 12 ayat (4) KUHP ditegaskan pula bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Jika usia terpidana ketika dijatuhi hukum 30 tahun, maka tentunya kepadanya tidak boleh dijatuhi hukuman seumur 30 tahun sampai usianya 60 tahun, karena dengan demikian hukumannya menjadi lebih dari 20 tahun yang tegas dilarang menurut Pasal 12 ayat (4) KUHP. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan pidana seumur hidup itu adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan.

Maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana penjara atau pidana kurungan melalui proses pemenjaraan itu, semula adalah untuk membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran. Pemenjaraan dimaksudkan untuk memberikan balasan terhadap kesalahan

dan membuat pelaku menjadi jera (*deterrence*) sehingga tidak lagi akan pernah lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran di masa selanjutnya. Tujuan pertama bersifat '*retibutive*' berdasarkan prinsip '*retributive justice*' (keadilan yang bersifat pembalasan) sedangkan yang kedua bersifat '*preventive*' atau pencegahan agar orang yang bersangkutan tidak berbuat kesalahan lagi (*special deterrence*) ataupun mencegah orang lain untuk tidak mencontoh pelanggaran yang dilakukan (*general deterrence*).

Namun, dalam perkembangan zaman, seiring dengan semakin

meningkatnya standar-standar nilai peradaban umat manusia, semakin banyak sarjana dan ahli hukum yang mengembangkan teori dan praktik kebijakan pemidanaan dengan cara pandang baru yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip pencegahan dan upaya pemulihan daripada membalaskan kesalahan. Prinsip pemulihan keadaan inilah yang dinamakan sebagai '*restorative justice*' yang dinilai lebih utama dan lebih berorientasi ke masa depan (*forward looking*) daripada '*retributive justice*' yang berorientasi ke masa lalu (*backward looking*). Karena itu, istilah penjara itu sendiri di Indonesia mengalami perubahan. Sejak tahun 1960-an, istilah itu dipandang tidak lagi sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga diganti dengan istilah yang dianggap lebih manusiawi dan sejalan dengan filosofi baru, yaitu pemasyarakatan atau resosialisasi. Sampai sekarang istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas atau LP) terus dipakai secara resmi dalam peraturan perundang-undangan sebagai ganti istilah penjara. ■

Parade Foto

FOTO: IRMA

Kubu pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta melalui Tim Advokasi Merah Putih untuk Perjuangan Keadilan, Kamis (24/7/2014), mengadakan Komisioner KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan DKPP. Pengaduan mereka diterima langsung oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini di kantor DKPP,

FOTO: IRMA

Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie membuka rapat koordinasi bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Selasa malam (1/7/14). Prof Jimly memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TPD daerah yang telah membantu tugas DKPP.

FOTO: IRMA

DKPP Sabtu, 12/7 menggelar buka bersama. Acara diadakan di rumah Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Turut hadir pada acara ini Ketua Bawaslu Muhammad, KPU Husni Kamil Manik, serta beberapa jajaran KPU, Bawaslu, pimpinan dan staf DKPP, serta awak media.

FOTO: IRMA

Sebanyak delapan Pengurus Pusat Kesaktuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersilaturahmi kepada Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie, Senin (14/7). Mereka diterima di ruang kerjanya, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jl. MH Thamrin 14, Jakarta Pusat.

FOTO: IRMA

Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, Rabu (9/7) pukul 08.15 WIB memberikan hak suaranya di TPS 21 Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap tenang menunggu hasil akhir penghitungan resmi KPU.

FOTO: ARIF SYARWANI

Paguyuban Advokat Peduli Konstitusi (PAPK) yang terdiri dari para Advokat lintas Parpol audiensi dengan ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie SH, Senin (14/07/14). Para advokat ingin berkonsultasi terkait dengan putusan-putusan MK dalam penyelesaian PHPU Legislatif tahun 2014.